

**PEMIKIRAN MULTIKULTURAL KH. ABDURRAHMAN
WAHID PERSPEKTIF BUDAYA MUTU EDWARD SALLIS**



Oleh:

MEGA ZULFY LESTARI

NIM. 1910547

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL
ULAMA KEBUMEN**

2021

**PEMIKIRAN MULTIKULTURAL KH. ABDURRAHMAN
WAHID PERSPEKTIF BUDAYA MUTU EDWARD SALLIS**



Oleh:

MEGA ZULFY LESTARI

NIM. 1910547

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN**

2021

NOTA DINAS

Hal: Tesis

Kepada Yth,
Direktur Sekolah Pascasarjana
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama
Kebumen

Assalamu 'alaikum.wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **“Pemikiran Multikultural KH. Abdurrahman Wahid Perspektif Budaya Mutu Edward Sallis”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mega Zulfy Lestari, S.Pd
NIM : 1910547
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Akademik : 2020/2021

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap tesis tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqosyah Tesis Pascasarjana IAINU Kebumen.

Wassalamu 'alaikum.wr.wb

Kebumen, 01 April 2021
Pembimbing



Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I NIDN: 2123027201

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul: “**PEMIKIRAN MULTIKULTURAL KH. ABDURRAHMAN WAHID PERSPEKTIF BUDAYA MUTU EDWARD SALLIS**” telah dipertahankan dihadapan sidang dewan penguji tesis pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 April 2021

Pukul : 12:00-13:00

Oleh : Nama : Mega Zulfy Lestari,

S.Pd NIM : 1910547

Program Studi : S-2 Manajemen Pendidikan Islam

Dewan Penguji Tesis:

Ketua Sidang : Faisol, M.Ag (.....)

Sekretaris Sidang : Fikria Najitama, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Sudadi, M.Pd.I (.....)

Penguji II : Dr. H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum(.....)

Kebumen, 19 April 2021

Sekolah Pascasarjana

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Direktur,



(r. Sulis Rokhmawanto, M.S.II NIDN: 2108058801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Zulfy Lestari, S.Pd
NIM : 1910547
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Kebumen, 01 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mega Zulfy Lestari, S.Pd

NIM. 1910547

MOTTO

“Semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin besar rasa toleransinya” [KH.

Abdurrahman Wahid]¹

“Perkecillah dirimu, maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu,
maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata-kata”

[Mevlana Jalaluddin Rumi]²

¹ Hubaib Ansharullah, *Assalamu'alaikum Gus Dur: Sang Guru Bangsa yang Humoris*, (Universitas Ciputra, 2020), hlm. 4.

² Agung Setiyo Wibowo, *The Calling: Seni Mewujudkan Hidup yang Bermakna*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 51.

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak Ibu tercinta, Rakhmat Basuki dan Mukhlisoh yang telah memberikan inspirasi, motivasi, bimbingan yang senantiasa mendo'akan putrinya dalam mewujudkan cita-cita.
2. Kakak tercinta, Khakam Umam Asnawi, S.Sos.I., MA yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama melanjutkan studi di Pascasarjana.
3. KH. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh muslim Indonesia dan guru Bangsa yang menginspirasi penulis.
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi baik di pendidikan formal maupun non-formal yang telah mendidik dengan penuh ikhlas memberikan energi positif serta motivasi bagi perkembangan karir penulis.
5. Segenap dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana IAINU Kebumen
6. Almamater Pascasarjana IAINU Kebumen

ABSTRAK

Mega Zulfy Lestari, NIM: 1910547, *Pemikiran Multikultural KH. Abdurrahman Wahid Perspektif Budaya Mutu Edward Sallis*, Tesis, Program Pascasarjana IAINU Kebumen, 2021

Pembangunan bangsa mengalami disintegrasi sosial terlihat pada isu intoleransi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Isu intoleransi di lingkungan sekolah mengindikasikan bahwa sistem pendidikan Indonesia belum menemukan jati dirinya. Pendidikan bermutu menciptakan SDM unggul dan mampu menjawab kebutuhan akan kondisi masyarakat yang plural. Pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis perlu dikaji untuk berkontribusi menyelesaikan problem pluralitas di lingkungan sekolah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan literer. Metode yang digunakan adalah *historical research* untuk mengungkap biografi sang tokoh dari segi kehidupan maupun pemikirannya dan metode *content analysis* untuk mendapatkan inferensi yang valid. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi pemikiran multikultural Gus Dur terkait dengan pendidikan meliputi menghargai budaya lokal, menegakkan demokrasi dan HAM, berbasis kemanusiaan dan keadilan, dan menghargai pluralitas. Multikultural dalam pendidikan menjadi sebuah strategi diimplementasikan dalam proses pembelajaran untuk menghargai heterogenitas dan pluralitas dengan menjunjung tinggi nilai kebudayaan, etnis, suku dan agama sehingga keadilan hak individu untuk mendapat pendidikan yang layak terlaksana. Pemikiran multikultural Gus Dur memiliki keterkaitan erat dengan budaya mutu Edward Sallis. Budaya mutu multikultural Gus Dur perspektif Edward Sallis meningkatkan kohesitas SDM sebagai aset utama penentu mutu suatu lembaga pendidikan.

Kata Kunci : Multikultural, Gus Dur, Budaya Mutu, Edward Sallis, SDM

ABSTRACT

Mega Zulfy Lestari, NIM: 1910547, *Multicultural Thinking of KH. Abdurrahman Wahid Perspective Quality Culture's Edward Sallis*, Thesis, Islamic Education Management, Postgraduate IAINU Kebumen, 2021

The Indonesian nation experiencing social disintegration seen on the issues of intolerance in the school environment as well as the community environment. The issue of intolerance in the school environment indicates that the Indonesian education system has not found itself closely related to the quality of education as an effort to create superior human resources and able to answer the needs of a plural society. KH. Abdurrahman Wahid's multicultural thinking in quality culture review needs to be reviewed to contribute to solving plurality problems in the school environment.

This study uses library research with a literary approach. This study uses historical research methods to uncover the biography of the character in terms of life and his thoughts and content analysis methods to get valid inference. Data collection techniques by analyzing primary data and secondary data.

The results showed that Gus Dur's conception of multicultural thinking related to education includes respecting local culture, upholding democracy and human rights, based on humanity and justice, and respecting plurality. Multiculturalism in education becomes a strategy implemented in the learning process to respect heterogeneity and plurality by upholding cultural, ethnic, tribal and religious values so that the justice of an individual's right to a proper education is carried out. Gus Dur's multicultural thinking was closely related to Edward Sallis's quality culture. Gus Dur's multicultural quality culture edward Sallis perspective increases the cohesion of human resources as the main asset determining the quality of an educational institution.

Key Words : Multicultural, Gus Dur, Quality Culture, Edward Sallis, SDM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā	T	te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titi di bawah)
ط	tā'	z	zet (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gāin	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mim	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	hā	H	-
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: حَامِدٌ

Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh: مَاتٌ

Jamā'ah

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhommah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung () di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

اَيُّوُ Bainakum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok teladan tunggal dan memiliki akhlak paling mulia, yang diutus untuk membangun sebuah peradaban besar bagi terwujudnya rahmat bagi seluruh alam. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.

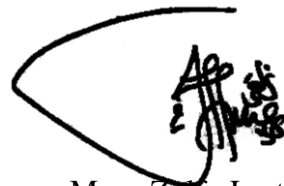
Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penyusunan tesis ini adalah berkat dorongan, arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen dan pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
2. Bapak Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
3. Bapak/Ibu Staf dan Seluruh Karyawan Sekolah Pascasarjana (SPs) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen yang juga turut membantu dalam berbagai urusan administrasi.
4. Bapak Ibu tercinta, Rakhmat Basuki dan Mukhlisoh serta kakak tercinta, Khakam Umam Asnawi, S.Sos.I, M.A yang telah memberikan bantuan baik berupa moril, materiil selama penulis menempuh studi di Sekolah Pascasarjana (SPs) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
5. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan tesis ini. Akhirnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan untuk penelitian selanjutnya.

Kebumen, 01 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Mega Zulfi Lestari'.

Mega Zulfi Lestari, S.Pd

NIM. 1910547

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN	ix
KATA TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Multikulturalisme	13
1. Sejarah Multikulturalisme	13
2. Sejarah Multikulturalisme di Indonesia	14
3. Filsafat Multikulturalisme	16
a. Liberalisme dan Utilitarianisme: John Rawis.....	16
a. Multikulturalisme: Charles Taylor	17
4. Definisi Multikulturalisme	18

5. Konsep Pendidikan Multikultural di Indonesia	19
B. Konsep Pendidikan Multikultural	24
1. Definisi Pendidikan Multikultural	24
2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Multikultural	27
3. Prinsip Pendidikan Multikultural	30
4. Ciri Pendidikan Multikultural	31
5. Pendekatan Pendidikan Multikultural	32
C. Konsep Budaya Mutu	36
1. Sejarah Budaya Mutu	36
2. Budaya Mutu sebagai Paradigma Baru	37
3. Definisi Budaya Mutu	43
D. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	44
BAB III : METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	53
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN	54
A. Biografi Tokoh	54
1. Biografi KH. Abdurrahman Wahid	54
2. Biografi Edward Sallis	69
B. Konsepsi Pemikiran Multikultural KH. Abdurrahman Wahid terkait dengan Pendidikan	71
C. Pemikiran Multikultural KH. Abdurrahman Wahid Perspektif Budaya Mutu Edward Salli	84
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	48
Tabel 4.1. Berbagai Tulisan Gus Dur sejak tahun 1970 hingga tahun 2000	63
Tabel 4.2. Tema Pokok Pemikiran Gus Dur tahun 1970-an sampai tahun 2000 ..	64
Tabel 4.3. Periodisasi Tulisan dan Kecenderungan Wacana Gus Dur sejak tahun 1970-an hingga 2000	65
Tabel 4.4. Dasar Pemikiran Gus Dur dan Budaya Mutu	90
Tabel 4.5. Rincian Dasar Pemikiran Gus Dur dalam Tinjauan Budaya Mutu.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Skema Budaya Mutu Multikultural.....	94
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Tesis	105
Lampiran 2 Riwayat Hidup	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara dikenal dengan istilah Nusantara. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terletak diantara dua benua dan dua samudera dengan segala aspek kehidupan yang beragam. Bangsa yang memiliki berbagai macam keragaman, seperti suku, budaya, adat istiadat, bahasa, serta agama dari Sabang sampai Merauke sebagai ciri khas kekayaan yang dimiliki Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang padat penduduk. Seiring padatnya penduduk tersebut, komposisi etnis di Indonesia juga beragam dan bervariasi baik dari ragam suku maupun budaya. Sejumlah keragaman menjadi potensi dan keunikan yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa yang besar.

Pada dasarnya potensi yang dimiliki mampu memberikan dinamika positif bagi kemajuan pembangunan bangsa. Akan tetapi, apabila masing-masing elemen masyarakat hanya melihat kepentingan golongannya sendiri dan keragaman tersebut tidak dikelola dengan baik dalam proses pembangunan bangsa maka negara akan mengalami disintegrasi sosial seperti KKN, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan dan hilangnya rasa kemanusiaan. Situasi tersebut akan menjadi dampak timbulnya perpecahan dan runtuhnya bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik dihasilkan data bahwa terdapat 10,88% generasi Post Gen Z yaitu generasi Indonesia yang berusia sekarang (lahir 2013 dst) hingga 7 tahun, dan 27,94% generasi Gen Z yaitu generasi Indonesia yang berusia sekarang 8-23 tahun (lahir tahun 1997-2012), serta 25,87% generasi Milenial yaitu generasi Indonesia yang berusia sekarang 24-39 tahun (lahir tahun

1981-1996).¹ Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 yang berbunyi: “*setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar*”,² bahwa generasi Post Gen Z dan Gen Z merupakan potensi sumber daya manusia yang menjanjikan untuk membangun bangsa Indonesia kedepannya, apabila ditunjang dengan layanan pendidikan dasar yang bermutu. Warga negara berhak mendapat layanan pendidikan dasar yang bermutu sehingga tercipta sumber daya manusia yang memiliki mutu unggul dan mampu bersaing di tengah pesatnya globalisasi sekarang.

Realitas dunia pendidikan di Indonesia masih belum menemukan jati dirinya sebagai solusi dalam berbagai persoalan yang dihadapi baik intern lembaga maupun ekstern lembaga. Hal ini yang menyebabkan sumber daya manusia hanya unggul dari segi kognitif namun lemah dari segi afektif. Sebagaimana contoh isu kontemporer intoleransi di lembaga pendidikan hasil penelitian setara institute dan wahid institute yang dilansir oleh kompas.com yaitu pemaksaan penggunaan simbol-simbol agama tentang kewajiban peserta didik untuk mengenakan jilbab (seragam muslim) yang terjadi di Bali

2014, Yogyakarta 2019, dan terakhir di Padang 2021.³ Hal tersebut mengindikasikan bahwa sekolah belum mampu mengatasi masalah-masalah perbedaan yang ada di lingkungan internnya. Tentu hal ini berdampak pada kebermutuan sistem pendidikan nasional Indonesia. Apabila konflik intern terutama berkaitan SARA tidak bisa dihindarkan, tentu hal tersebut akan berdampak pula pada output lulusan yang tidak mampu menjawab kebutuhan kondisi masyarakat yang plural. Hal tersebut diperkuat oleh Edward Sallis yang menjelaskan bahwa:

Poor curriculum design, unsuitable and poorly maintained bulidings, poor working environment, unsuitable systems and procedures,

¹ BPS, *270,20 juta Penduduk Indonesia hasil SP2020*, 21 Januari 2021, www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html, diakses tanggal 17 February 2021.

² UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³ Dian Ihsan, *Kumpulan Kasus Intoleransi di Sekolah*, 26 Januari 2021, pukul 18:46 WIB, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.

insufficiently creative timetabling, a lack of necessary resources, and insufficient staff development (terdapat berbagai macam sumber yang menyebabkan kondisi rendahnya mutu pendidikan, yaitu buruknya perencanaan kurikulum, sarana dan prasarana yang tidak dikelola dengan baik, lingkungan kerja yang tidak kondusif, tidak efektifnya manajemen waktu, kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, dan anggota tidak mendapat layanan mengembangkan potensinya).⁴

Pendidikan tidak bisa terlepas dari pembahasan keadaan masyarakatnya karena segala sesuatu yang berlangsung dalam dunia pendidikan adalah gambaran dari kompleksitas kehidupan masyarakat. Demikian juga, kondisi perkembangan, kemajuan dan peradaban suatu masyarakat baik akan tercermin pada kondisi pendidikannya. Oleh karena itu, majunya dunia pendidikan adalah cerminan dari majunya masyarakat dan bobroknya dunia pendidikan mencerminkan kondisi masyarakat yang penuh persoalan juga.⁵

Berdasarkan problematika tersebut pendidikan memiliki tanggungjawab moral terhadap upaya membangun kembali fundamental pendidikan yang berkebudayaan di Indonesia. Seiring berkembangnya pemikiran pendidikan, hal tersebut tentu mendapat perhatian khusus dimata para *stakeholder* pendidikan. Pemikir pendidikan berusaha untuk mengurai dan menjawab problematika pendidikan tersebut dengan menyatukan pandangan antara keanekaragaman masyarakat dengan dunia pendidikan sehingga tercipta mutu pendidikan yang berkebudayaan.

Fungsi pendidikan yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3

Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁶

⁴ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 2002), hlm. 38.

⁵ Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 13.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 5.

Secara umum, pendidikan merupakan suatu sistem yang pada pencapaian tertentu dinilai dan diyakini sebagai yang paling ideal. Tujuan ideal yang hendak dicapai bagi sistem pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mandiri, serta bertanggung jawab.⁷

Choirul Mahfudz menjelaskan bahwa, pendidikan multikultural adalah usaha sadar untuk merespon fenomena konflik etnis, sosial, budaya yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural. Selain itu, dapat dikatakan bahwa konsep pendidikan multikultural menjadi *counter* atas pemikiran-pemikiran eksklusivisme yang mulai masuk ke dalam dunia pendidikan. Hingga kini, wajah multikultural bangsa Indonesia, ibarat api dalam sekam yang suatu saat bisa muncul akibat suhu politik, agama, dan sosial budaya yang memanas, yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali.⁸ Pendidikan berbasis multikultural diharapkan membuka sikap dan mindset peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Sebagaimana pendapat Arcaro yang dikutip oleh Setya Raharja, bahwa demi terciptanya pendidikan multikultural yang intensif, efektif dan efisien perlu adanya daya dukung dari pengelolaan lembaga pendidikan sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan demi berlangsungnya pendidikan multikultural di sebuah lembaga pendidikan. Hal tersebut akan tercapai apabila sekolah memiliki manajemen mutu secara total (*total quality management*).⁹ Mutu pendidikan menjadi salah satu yang diharapkan diterima oleh masyarakat sebagai bukti hasil pelayanan yang baik. Hal tersebut memiliki kesesuaian dengan hak warga negara Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 5

ayat 1 dan ayat 5 yaitu: “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama*

⁷ Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, (LP3NI, 1998), hlm. 30.

⁸ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4.

⁹ Setya Raharja, “Mengkreasikan Pendidikan Multikultural di Sekolah dengan Menerapkan Manajemen Mutu Sekolah Secara Total”, dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No.02/ThVI/Oktober/2010, hlm. 28.

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.¹⁰ Tidak heran masyarakat menuntut layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Namun, kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan masih menjadi permasalahan pendidikan hingga saat ini. Hal tersebutlah yang menyebabkan hak warga negara mendapat layanan pendidikan yang bermutu belum terpenuhi secara total.

Pemerataan pendidikan menjadi salah satu indikasi bahwa pendidikan di suatu negara telah bermutu. Tujuan SDG (*Sustainable Development Goals*) sebagaimana yang dikutip oleh Jawa Pos tentang *quality education* merupakan usaha menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.¹¹

Pendidikan bukan hanya ditujukan untuk sebagian kecil masyarakat, melainkan untuk seluruh masyarakat.

Selain itu, hasil kesimpulan bersama antara *Regional Education Development and Improvement Project* tahun 1999, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Depdiknas, serta *International Development Center of Japan (IDCJ)* menyatakan bahwa terdapat delapan masalah yang menjadi tugas Depdiknas, yaitu; (1) demokratisasi pendidikan; kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan masih belum sepenuhnya tercapai, (2) rendahnya relevansi pendidikan, (3) rendahnya akuntabilitas, (4) rendahnya profesionalisme dalam praktik pendidikan dan manajemen, (5) kurang efisien dan efektivitas dalam alokasi anggaran dan manajemen, (6) adanya keseragaman, (7) desentralisasi manajemen pendidikan belum tercapai, (8) debirokratisasi manajemen pendidikan belum terlaksana.¹² Berkaitan dengan

¹⁰ UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹¹ Izzah Afadha, *Hari Pendidikan Nasional Sebagai Momentum Pemerataan Pendidikan*, radarbojonegoro.jawapos.com, 02 Mei 2020, pukul 10:55:49 WIB, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/05/02/192001/hari-pendidikan-nasional-sebagai-momentum-pemerataan-pendidikan>, diakses tanggal 11 Januari 2021.

¹² Syafaruddin, *Kepemimpinan Pendidikan: Akuntabilitas Pimpinan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Jakarta: Quantum Teaching, 2010), hlm. 5-6.

rendahnya relevansi pendidikan, pendidikan seringkali dipandang tak mampu mengikuti akselerasi dinamika yang terjadi dalam suatu masyarakat. Padahal budaya dan manajemen sekolah memiliki keterkaitan erat dan tertuang pada terciptanya peserta didik yang berkarakter yaitu keterkaitan antara nilai-nilai karakter terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Budaya yang berintegrasi dan bersinergi dengan manajemen pendidikan akan melahirkan generasi muda masa depan yang tidak hanya cerdas intelektual secara kognitif dan psikomotor tetapi juga dapat terbentuk sikap afektif yang memiliki keluhuran karakter sebagai sosok manusia yang unggul yang dibalut dengan ketinggian dan keluhuran karakter.¹³

Ditegaskan oleh Soedijarto bahwa peran dunia pendidikan untuk melahirkan generasi muda yang berkarakter sangat diperlukan demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan untuk mendorong terwujudnya hakikat tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional.¹⁴

Senada dengan pandangan Zamroni bahwa penyediaan lembaga pendidikan yang bermutu merupakan kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu tujuan utama dari strategi jangka panjang pendidikan di Indonesia.¹⁵

Syaiful Sagala memberikan pemahaman bahwa budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berfikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya.¹⁶

Sedangkan Sergiovanni sebagaimana yang dikutip oleh Miftachul Choiri memberikan pemahaman bahwa budaya

sekolah merupakan faktor penting dalam membentuk peserta didik menjadi

¹³ Warni Tune Sumar, *Strategi Pemimpin dalam Penguatan Iklim Sekolah Berbasis Budaya Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 156.

¹⁴ Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 129.

¹⁵ Zamroni, "Paradigma Baru Mutu Pendidikan di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta Ke-45, Sabtu 25 April 2008, hlm. 2.

¹⁶ Syaiful Sagala, *Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 111

manusia yang penuh optimis, berani tampil, berperilaku kooperatif, serta mempunyai kecakapan personal dan akademik.¹⁷ Edward Sallis menegaskan bahwa budaya TQC (*total quality control*) mempengaruhi kualitas suatu lembaga, seperti; *had excellent relationships with their customers*, kedekatan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan menjadi sebuah budaya kompetitif yang menguntungkan untuk mengontrol mutu. Adanya perhatian dan penghargaan terhadap karyawan juga menjadi sebuah indikator budaya mutu, kemudian *had simple and non-bureaucratic structures*, yaitu lembaga yang bermutu adalah lembaga yang memiliki struktur sederhana dan non-birokrasi, namun tim mampu bekerja dengan aktif dan memiliki antusias yang dipimpin dengan gaya kepemimpinan langsung.¹⁸

Berdasarkan hasil survei yang dimuat oleh Munif Chatib bulan Agustus

2010 menunjukkan empat kategori sekolah yang ada di Indonesia, yakni; (1) sekolah yang tidak mati dan tidak hidup, ciri-cirinya meliputi: tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat di sekitarnya, jumlah siswa sedikit, kualitas guru yang masih rendah, manajemen sekolah yang amburadul; (2) sekolah tumbuh, dengan ciri-ciri: kepercayaan masyarakat yang besar, jumlah siswa yang mendaftar lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas sekolah, masih berada pada jenjang tertentu, membutuhkan perekrutan guru baru setiap tahun, manajemen sekolah yang sedang mencari bentuk; (3) sekolah yang memiliki manajemen Internasional, dengan ciri-ciri: kepercayaan masyarakat sangat besar, jumlah siswa yang mendaftar lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas sekolah, fokus pada peningkatan kualitas guru dengan pelatihan dan pengembangan guru yang terstruktur, manajemen sekolah sudah stabil; (4) sekolah yang baru akan dibangun, ciri-cirinya adalah penyelenggara sekolah baru punya niat membangun sekolah, antara lain dimulai dari pembangunan fisik sekolah dan perekrutan guru. Dari hasil

survei tersebut, nampak jelas bahwa pendidikan di Indonesia masih memiliki

¹⁷ Miftachul Choiri, "Makna School Culture dan Budaya Mutu bagi Stakeholder di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Demangan Kota Madiun Tahun Pelajaran 2014-2015", dalam Jurnal Kodifikasia, Vol. 9, No. 1, Tahun 2015, hlm. 151.

¹⁸ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 2002), hlm. 9.

problematika baik dari sisi intern maupun ekstern dalam menuju sekolah mutu.¹⁹

Bagi lembaga pendidikan, mutu adalah sesuatu yang absolut bernilai mutlak yang harus dipertahankan dan dilestarikan sehingga kualitas sekolah terjamin. Garvin menjelaskan terdapat lima macam perspektif mutu, yaitu; (1) *Transcendental approach* dimana kualitas dapat dirasakan, diketahui tapi sulit didefinisikan; (2) *product based approach* kualitas merupakan atribut atau spesifikasi secara kuantitatif yang dapat diukur; (3) *used based approach* kualitas tergantung pada orang yang memandangnya sehingga pelayanan yang paling memuaskan preferensi seseorang yang merupakan pelayanan yang paling tinggi sehingga pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakan; (4) *manufacturing based approach* menentukan kualitas yang sudah distandarkan; (5) *value based approach* memandang kualitas dari segi nilai dan kemanfaatannya yang paling bermakna dari pelanggan.²⁰

Budaya mutu pada suatu lembaga pendidikan melihat pada dua sisi, yaitu sisi makro dan sisi mikro. Sisi makro budaya mutu dimulai dengan keputusan politik, perumusan regulasi, dan kebijakan-kebijakan. Sedangkan dalam sisi mikro mutu pendidikan dimulai dengan perumusan visi-misi lembaga, pengelolaan, dan partisipasi. Perumusan visi, misi dan kebijakan pengelolaan lembaga mengarah kepada perilaku mutu di sekolah.²¹

KH. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang sangat terbuka terhadap konsep multikulturalisme di tengah-tengah masyarakat yang plural. Beliau mengakomodir segala perbedaan yang ada untuk hidup berdampingan dan damai. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang multikultural dapat dilihat dari segi aspek agama, politik, sosial dan budaya. Sebagai pemikir

¹⁹ Munif Chatib, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Spesial dan Semua Anak Juara*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 4

²⁰ Barnawi, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2017), hlm. 16-17.

²¹ Hendrikus Midun, "Membangun Budaya Mutu dan Ungguk di Sekolah", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 9, No. 1, Januari 2017, hlm. 54.

muslim kontemporer, pemikiran beliau menjadi sumber motivasi dan inspirasi terutama bagi dunia pendidikan yang menjadi gambaran kompleksitas masyarakat. KH. Abdurrahman Wahid mampu membuka mata hati masyarakat tentang keterkaitan antara agama, kebangsaan dan kemanusiaan. Hal ini didasarkan karena KH. Abdurrahman Wahid lahir dan dibesarkan dilingkungan pesantren yang plural sehingga beliau adalah sosok ideal negarawan yang mengajarkan, mencontohkan dan meyakini bahwa perbedaan adalah Rahmat, sunatullah.²²

Dalam konteks multikultural, KH. Abdurrahman Wahid mengkorelasikan cara berpikir klasik dan pemikiran modern. Pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perlu dikembangkan dan menjadi model pendidikan Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:²³ (1) Realitas Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, dan agama dengan bahasa yang beragam dan membawa budaya yang heterogen serta tradisi dan peradaban yang beraneka ragam, (2) Konteks pluralitas telah ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, (3) Pendidikan multikultural upaya mencegah fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan dan kesewenang-wenangan. Selain itu, pendidikan multikultural juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan ke-Tuhanan serta memberikan harapan dalam mengatasi berbagai gejolak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang multikulturalisme perlu diinterpretasikan dalam dunia pendidikan.

Proses pembelajaran dilaksanakan tanpa melupakan perhatian terhadap aspirasi peserta didik dengan memberi kesempatan dalam memilih aktivitas belajar yang dilakukan, tanpa mengabaikan peserta didik yang lamban memahami dan tidak merugikan peserta didik yang cepat dalam memahami bahan ajar. Proses pembelajaran akan tercipta kondisi yang menyenangkan dan kondisi yang aspiratif memberikan pengalaman baru pada peserta didik.

²² Zuhairi Misrawi, *Gus Dur Santri Par Excellence*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm 37-38.

²³ Maslikhah, *Quo Vadis: Pendidikan Multikultural*, (Surabaya: Temprina Media Grafika, 2007), hlm. 159.

Peserta didik mendapatkan pelayanan yang proporsional.²⁴ Budaya mutu perlu disosialisasikan sebagai pokok permasalahan yang dipengaruhi oleh pimpinan lembaga, tenaga kependidikan serta lingkungan lembaga. Mutu sangat penting dalam kehidupan manusia baik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peserta didik harus mendapatkan layanan dan fasilitas yang memadai untuk mencapai perkembangan dan belajar yang optimal. Kehidupan peserta didik tidak akan pernah lepas dari masyarakat yang beragam budaya, adat-istiadat, maupun kebiasaan-kebiasaan tertentu.²⁵

Oleh karena itu, sekolah bermutu adalah sekolah yang mampu memberikan kebermanfaatn terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, mampu memberikan atau menawarkan inovasi-inovasi yang integratif oleh *stakeholder* pendidikan pada masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “PEMIKIRAN MULTIKULTURAL KH. ABDURRAHMAN WAHID PERSPEKTIF BUDAYA MUTU EDWARD SALLIS”. Peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang multikultural ditinjau dari segi budaya mutu Edward Sallis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid terkait dengan pendidikan?
2. Bagaimana pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis?

²⁴ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. xiii.

²⁵ Setya Raharja, *Mengkreasi Pendidikan Multikultural di Sekolah.....* hlm. 29.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan konsepsi pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid terkait dengan pendidikan
2. Menjelaskan pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan informasi dan sumber referensi mengenai nilai-nilai multikultural KH. Abdurrahman Wahid dan budaya mutu Edward Sallis dalam dunia pendidikan.
- b. Menambah khazanah wawasan keilmuan seputar pemikiran tokoh KH. Abdurrahman Wahid dan Edward Sallis
- c. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pemikir intelektual dunia pendidikan.

2. Manfaat Pragmatis

- a. Diharapkan mampu memberikan konsep solutif mengenai budaya mutu berbasis multikultural bagi instansi-instansi pendidikan.
- b. Sebagai bahan bacaan dan acuan pustaka bagi penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan dunia pendidikan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk membentuk suatu pembahasan yang utuh dan terarah maka dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bagian ini merupakan dasar dan kerangka awal dalam melaksanakan penelitian.

Bab II berupa tinjauan teoritis yang menerangkan tentang konsep pendidikan multikultural, konsep multikulturalisme, konsep budaya mutu, serta kajian hasil penelitian yang relevan.

Bab III memuat metode penelitian yang menerangkan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV merupakan analisis hasil penelitian yang meliputi tiga sub bab, yaitu sub bab I, menjelaskan biografi KH. Abdurrahman Wahid mengenai riwayat hidup beliau yang meliputi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan perjalanan organisasi beliau, serta karya-karya pemikiran beliau, juga memuat biografi tokoh pemikir budaya mutu Edward Sallis; sub bab II, mengkaji konsepsi pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid terkait dengan pendidikan; dan sub bab III, mengkaji pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan secara umum dari hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup yang dilengkapi daftar pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Multikulturalisme

1. Sejarah Multikulturalisme

Seiring dengan berkembangnya arus gelombang globalisasi yang melanda dunia dipacu dengan teknologi informasi menjadikan angin multikulturalisme berhembus sangat keras. Kemajuan teknologi informasi menjadikan ruang *cyber* semakin luas, membentuk sebuah universe baru yang dibangun melalui komputer dan jaringan komunikasi. Ruang *cyber* melahirkan budaya maya berupa geografi mental yang dibangun melalui berbagai konsensus dan revolusi, teritori mental yang dipenuhi berbagai data dan kebohongan, suara yang bisu dan mata yang tak tampak, serta keseluruhan yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin membagi mimpi dan sebagainya. Dunia nyata semakin disempitkan oleh dunia maya yang berkembang dengan sangat cepat, oleh karena itu tidak dapat menghindarkan dari lahirnya multikulturalisme dewasa ini.¹

Dunia maya yang semakin luas telah melahirkan berbagai jenis fantasi manusia yang bukan hanya mengenal budayanya sendiri tapi juga mengenal budaya dari segala penjuru dunia. Globalisasi melahirkan kecenderungan ke arah monokultural karena imperialisme kebudayaan Barat. Anggapan multikulturalisme menjadi suatu arus balik dari gelombang globalisasi. Multikulturalisme setelah Perang Dunia II semakin menonjol akibat lahirnya negara-negara baru yang bebas dari penjajahan. Negara-negara baru dengan dengan beragam kebudayaan menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme Eropa dan “kebudayaan putih”. Gerakan pengakuan akan kebudayaan beriringan

dengan lahirnya nasionalisme dan demokrasi serta pengakuan terhadap

¹ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 73.

hak asasi manusia. Hal tersebut mendapat angin segar dari negara-negara berkembang terhadap pengakuan kebudayaannya yang khas.²

Di negara-negara maju juga terjadi perubahan yang besar terutama disebabkan karena pengakuan atas hak asasi manusia bergandengan dengan pertumbuhan demokrasi yang menghormati akan cara hidup yang berbeda dengan kebudayaan Barat yang telah *established*. Kini negara-negara eks penjajah menghormati adanya budaya-budaya lain, hal ini disebabkan oleh adanya migrasi bangsa-bangsa yang terjajah sesudah PD II. Sebagai contoh: migrasi pekerja Turki memasuki Eropa Barat di dalam pembangunan, terbukanya pintu bagi negara-negara Barat terhadap bangsa-bangsa kulit berwarna dari Asia dan Afrika yang membawa budayanya masing-masing, Martin Luther King memelopori gerakan anti segregasi di Amerika Serikat terhadap golongan Negro, Australia membuka pintu bagi bangsa Asia yang ber-ras kuning dari utara. Multikulturalisme berkembang seiring dengan berkembangnya demokrasi dan hak asasi manusia.³

2. Sejarah Multikulturalisme di Indonesia

Multikulturalisme Indonesia telah ada sebelum masa kemerdekaan, hal ini tampak pada masuknya para penjajah Eropa dan pendatang dari Timur Tengah. Sejarah kontemporer juga mencatat adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908, lima sila Pancasila, pasal 32 UUD 1945, simbol Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Burung Garuda Pancasila, dan semangat gotong royong, sebagai bukti yang tak terbantahkan tentang jiwa dan semangat multikultural bangsa Indonesia.⁴

Namun pada masa pemerintahan Orde Baru muncul ketidakramahan terhadap pengembangan pendidikan multikultural. Hal ini terkait dengan kebijakan politik pada saat itu yang lebih mengutamakan pembangunan

² *Ibid...* hlm. 74.

³ *Ibid...* hlm. 74-75.

⁴ Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 97.

stabilitas ekonomi dan politik. Selama hampir 30 tahun masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami krisis disintegrasi bangsa yang munculnya konflik sosial berbau SARA. Istilah pendidikan multikultural mulai dibahas kembali sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Sebagaimana yang dilakukan pada masa Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid yang kembali mengizinkan perayaan-perayaan etnis Cina setelah sekian lama ditindas dan tidak boleh dirayakan pada masa Orde Baru.⁵

Bagi pendidikan nasional Indonesia sendiri, multikultural menjadi sebuah tantangan untuk melakukan transformasi. Cita-cita Indonesia dimasa depan seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu terciptanya masyarakat madani atau *civil society*. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis dan multikultural. Membangun masyarakat yang demokratis diperlukan suatu pandangan baru mengenai nasionalisme Indonesia dengan rumusnya yaitu membangun suatu *nation-state* yang multikultural. Keberhasilan mengenai nasionalisme tersebut harus didukung oleh warga negara Indonesia yang cerdas dan bermoral. Pembangunan tersebut akan berhasil apabila adanya pembinaan perubahan sikap melalui proses pendidikan yang berazaskan demokrasi dan multikultural. Proses pendidikan tidak akan pernah terlepas dari sebuah kurikulum yang merupakan jantung pendidikan. Kurikulum disusun yang berisikan pendidikan multikultural yang menumbuhkan sikap toleran mengakui pluralisme. Guru sebagai pelaksana kurikulum juga memiliki peran penting yang akan mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan multikultural.⁶

⁵ Admila Rosada dkk, *Pendidikan Multikultural: Strategi Mengelola Keberagaman di Sekolah*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), hlm. 57.

⁶ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. 99-104.

3. Filsafat Multikulturalisme

Filsafat multikulturalisme berangkat dari pemikiran filsuf kontemporer John Rawls seorang penganut liberalisme terutama dalam bidang etika dari *Harvard University* dan Charles Taylor seorang profesor dalam bidang filsafat budaya dan politik dari *McGill University*.

a. Liberalisme dan Utilitarianisme: John Rawls

Menurut Rawls manusia dilahirkan tanpa mengetahui akan sifat-sifatnya, posisi sosialnya, dan keyakinan moralnya. Manusia dalam situasi tersebut tidak memaksimalkan kemampuan karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan kemampuan tersebut, oleh sebab itu manusia meminimalisasikan potensinya yang serba kurang. Terhadap posisi tersebut, Rawls mengemukakan dua prinsip yaitu: a) setiap manusia harus mempunyai sejumlah maksimum kebebasan individual dibandingkan dengan orang lain, bisa menikmati kemerdekaan yang dimiliki orang lain. b) setiap ketidaksamaan sosial dan ekonomi haruslah memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tak memperoleh keberuntungan.⁷

Falsafah John Rawls mengenai kemerdekaan individu memberi pemahaman sebagai berikut:

Setiap individu mempunyai dasar yang tak dapat dilanggar mengenai keadilan, bahkan kemakmuran suatu masyarakat tidak dapat melanggar hak tersebut. Oleh sebab itu masyarakat yang berkeadilan, hak-hak yang dijamin oleh keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dijadikan tawar-menawar politik atau pun dimasukkan di dalam perhitungan kepentingan sosial.

Dijelaskan oleh John Rawls bahwa prinsip keadilan merupakan posisi awal kesamaan dari seorang yang bebas dan rasional. Keadaan tersebut merupakan suatu hipotesis di dalam filsafat Rawls yang sejalan dengan teori *social contract*. John Rawls menerapkan

⁷ *Ibid...* hlm. 75-76.

pandangan tersebut dalam kemerdekaan konstitusional. Dalam demokrasi konstitusional terdapat ruang untuk pembangkangan sosial dan tantangan-tantangan kata hati terhadap berbagai keputusan sosial yang merugikan kemerdekaan individu. Berdasarkan teori keadilan tersebut, John Rawls mengemukakan konsep masyarakat sebagai “*social union of social unions*” serta merumuskan nilai-nilai komunitas.⁸

Liberalisme dipengaruhi oleh filsafat politik John Locke, abad pencerahan yang percaya pada rasionalisme serta kemajuan umat manusia, ekonomi pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith serta utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Pada abad ke-19 liberalisme menekankan pada toleransi agama, individualisme, serta di bidang politik menonjolkan perubahan sosial dan politik yang moderat.⁹

b. Multikulturalisme: Charles Taylor

Pemikiran Taylor mengenai *the politics of recognition* yang diterjemahkan oleh Habermas mengatakan bahwa perlindungan yang sama di bawah hukum saja belum cukup dalam suatu demokrasi konstitusional. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem yang mengikat tidak menghapuskan kondisi sosial yang berbeda-beda juga terhadap perbedaan budaya. Pokok pikiran Charles Taylor dikemukakan saat lembaga-lembaga pemerintah, sekolah dan universitas sedang dibawah sorotan yang tajam karena gagal untuk menghargai identitas budaya yang khusus dari warga negaranya.¹⁰

Dalam kehidupan politik dewasa ini muncul keinginan untuk diakui (*recognition*) terhadap hak hidup kelompok dalam masyarakat dengan kebudayaannya yang khas. Perkembangan kebutuhan akan *recognition* berasal dari filsuf Jean Jacques Rousseau. Rousseau

mengkritik dengan tajam sistem kehormatan hirarkis yang disebut

⁸ *Ibid...* hlm. 76-77.

⁹ *Ibid...* hlm. 77.

¹⁰ *Ibid...* hlm. 79.

preferences yaitu akar dari korupsi dan ketidakadilan. Bagi masyarakat republik, semua orang mempunyai hak yang sama sehingga pandangan preferential tidak akan muncul. Berhubungan dengan persoalan identitas, setiap orang perlu diakui akan keunikan identitasnya. Hak tersebut perlu dijaga supaya identitas tersebut tidak diasimilasi oleh identitas mayoritas yang dominan.¹¹

4. Definisi Multikulturalisme

Multikulturalisme mengandung unsur yang kompleks, berasal dari kata “multi” yang berarti plural dan “kulturalisme” yang berarti kultur atau budaya. Kata plural senada dengan makna pluralisme, bahwa pengakuan bukan hanya pada hal-hal yang sejenis melainkan pada aspek politis, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pluralisme berkaitan dengan demokratis. Banyak negara yang menyatakan sebagai negara demokrasi tetapi tidak mengakui adanya pluralisme dalam kehidupannya sehingga terjadi berbagai segregasi. Pluralisme berkaitan dengan hak hidup kelompok masyarakat dalam suatu komunitas. Betapa pentingnya budaya dalam kehidupan masyarakat karena budaya merupakan alat perekat dalam suatu komunitas.¹²

Dalam tahap perkembangan paham multikultural, terdapat berbagai jenis pemikiran baru sebagai berikut:

- a. *Pengaruh studi kultural*, melihat secara kritis masalah-masalah esensial dalam kebudayaan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan yang diskriminatif, peranan kelompok masyarakat yang termarginalisasi, feminisme dan masalah toleransi antarkelompok maupun agama.
- b. *Poskolonialisme*, pandangan ini ingin mengungkit kembali nilai-nilai *indigenous* dalam budaya sendiri dan berupaya untuk melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing. Pemikiran ini melihat

¹¹ *Ibid...* hlm. 80.

¹² *Ibid...* hlm. 82.

kembali hubungan antara eks penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak stigma merendahkan kaum terjajah.

c. *Globalisasi*, telah melahirkan budaya global yang memiskinkan potensi-potensi budaya asli. Revitalisasi budaya lokal sebagai upaya menentang globalisasi yang mengarah kepada monokultural budaya dunia.

d. *Feminisme dan posfeminisme*, semula gerakan ini berupaya untuk mencari kesejahteraan perempuan, namun kemudian meningkat ke arah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan bukan hanya menuntut penghargaan dengan fungsi yang sama dengan laki-laki tetapi juga sebagai mitra yang sejajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di dalam masyarakat.

e. *Teori ekonomi politik neo-Marxisme*, teori ini memfokuskan pada struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh kelompok yang kuat.

f. *Posstrukturalisme*, pandangan ini mengemukakan perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai struktur-struktur yang telah mapan yang biasanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada¹³

5. Konsep Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pandangan H.A.R Tilaar mengenai pendidikan multikultural yang dapat dikembangkan di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan politik dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut:¹⁴

a. Right to Culture

Arus globalisasi menyebabkan adanya komersialisasi dan pendangkalan budaya. Munculnya gerakan reformasi dan berkembangnya identitas komunitas menyebabkan kekhawatiran

bermunculan adanya identitas suku bangsa yang akan

¹³ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global . . .*, hlm. 83-84.

¹⁴ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global.*, hlm. 185-190.

membahayakan perkembangan rasa ke-Indonesia-an. Lahirnya identitas kesukuan sebagai perkembangan budaya mikro di Indonesia, seakan-akan menjadi penyebab melorotnya rasa kebangsaan dan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, multikulturalisme tidak hanya didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia melainkan juga pengakuan kepada hak akan kebudayaan (*right to culture*). Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani di tengah-tengah kekuatan kebudayaan global.

b. Kebudayaan Indonesia yang menjadi

Ditengah-tengah maraknya identitas kesukuan, perlu ditekankan sistem nilai ke-Indonesia-an yang diwujudkan. Sebagai suatu paradigma baru di dalam sistem pendidikan nasional, maka perlu dirumuskan bagaimana pendidikan nasional diarahkan kepada pemeliharaan dan pengembangan konsep-konsep negara-bangsa yang didasarkan pada kekayaan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu proses mozaikisasi budaya Indonesia sebagai suatu proses pembudayaan ke arah perwujudan identitas manusia dan budaya.

c. Konsep pendidikan multikultural normatif

Pendidikan multikultural bukan sebuah konsep deskriptif yang hanya mengakui adanya pluralitas budaya dari suku-suku bangsa Indonesia melainkan sebuah tugas untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa. Konsep pendidikan multikultural normatif tidak dapat dipaksakan melalui program hafalan atau praksis pendidikan yang hanya menekankan kepada simbol-simbol kesatuan bangsa, tetapi di dalam praktiknya kita menghancurkan citra dari suatu bangsa yang pluralistik. Konsep pendidikan multikultural normatif adalah sebuah tuntutan atas hak asasi manusia dan sekaligus hak untuk mempunyai dan mengembangkan budaya sendiri (*right to culture*). Pendidikan

multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia.

d. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial

Berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, *the right to culture* dari perorangan maupun suatu kelompok suku, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan dan tidak jarang menyebabkan pergeseran-pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya. Rasa kesukuan yang berlebihan tersebut dapat melahirkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bangsa yang pluralistik. Pendidikan multikultural adalah sebuah rekonstruksi sosial, karena pendidikan multikultural tidak akan mengenal adanya fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama, pendidikan multikultural juga tidak mengenal adanya xenophobia.

Dalam masa transisi dewasa ini, pendidikan multikultural mempunyai tugas yang tidak ringan. Pertama-tama, pendidikan multikultural bertugas untuk memperdalam rasa identitas kesukuan yang kemudian secara terbuka mengenal dan mengerti akan nilai-nilai sosial budaya dan agama dari suku-suku yang lain. Pada tahap berikutnya, penghargaan yang sama terhadap sistem nilai dari masing-masing suku, mengetahui dan menghargai kelebihan-kelebihannya, dan membatasi diri dari kemungkinan clash dari sistem nilai yang berbeda. Akhirnya, pendidikan multikultural sebagai suatu strategi rekonstruksi sosial yang mempunyai tugas dalam mewujudkan kebudayaan Indonesia yang menjadi konsep keindonesiaan yang bersatu di atas pluralitas suku-suku yang beragam.

e. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru

Pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruangan sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial-budaya di Indonesia menuntut

pendidikan hati (*pedagogy of heart*) yaitu diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Adapun pedagogik baru yang dibutuhkan adalah;

1) Pedagogik pemberdayaan, berarti seseorang mengenal akan budayanya sendiri dan selanjutnya keberdayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara-bangsa Indonesia.

2) Pedagogik kesetaraan sesama manusia dalam kebudayaan yang beragam, merupakan sebuah upaya kesetaraan antarindividu, antarsuku, dan tidak membedakan asal usul suku dan agamanya. Kedua jenis pedagogik tersebut memerlukan adanya

keikutsertaan semua komponen termasuk stakeholder pendidikan. Pada dasarnya keikutsertaan masyarakat bukan hanya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, tetapi juga jalur-jalur pendidikan lainnya. Sangat diharapkan lembaga-lembaga tersebut bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan tanggungjawab serta menjadi administrator pendidikan untuk mewujudkan suatu pendidikan multikultural ditengah masyarakat Indonesia yang pluralistik demi membangun masyarakat yang bersatu sesuai cita-cita bangsa Indonesia.

f. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.

TAP/MPR RI Tahun 2001 No. VI dan VII tentang Etika Kehidupan Berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam pengembangan konsep pendidikan multikultural. Perlu kiranya menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti dan melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No.

20 Tahun 2003 terutama di tingkat pendidikan dasar.

Ada tiga hal yang mendorong berkembang pesatnya pendidikan multikultural menurut konsep pemikiran Tilaar mengenai pendidikan multikultural, yaitu:

a. Multikulturalisme dan Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, hak asasi manusia menjadi hal yang pasti terlibat namun tidak selalu diperhatikan. Ada masanya hak-hak manusia ditindas bahkan tidak dihargai hanya karena kekuasaan dan kekuatan yang dipusatkan kepada kepentingan sendiri maupun kelompok tertentu. Hingga pada tahun 1948, PBB mencetuskan suatu kesepakatan bersama antar bangsa, yaitu *Universal Declaration of Human Right*. Muncul deklarasi ini menjadi awal dari suatu gerakan untuk menegakkan hakikat manusia yang mempunyai nilai yang sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, bahasa, agama dan asal-usul.¹⁵

b. Multikulturalisme dan Globalisasi

Fenomena *the global village* membawa keterbukaan kehidupan manusia, terlebih didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi sehingga hubungan antar manusia semakin terbuka dan tidak dipungkiri menimbulkan rasa permusuhan pula sebagai akibat dari globalisasi. Pada dasarnya dalam hubungan kehidupan ekonomi, globalisasi melahirkan adanya pasar terbuka, mempererat antar manusia, antar ras, dan juga antar pemerintah. Globalisme lebih memperkuat lahirnya multikulturalisme baik dalam pengertian sederhana maupun dalam pandangan falsafah mengenai kehidupan bersama manusia. Membawa dan mengenalkan beragam kebudayaan yang ada dalam kehidupan yang belum pernah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, globalisasi melahirkan bentuk-bentuk interkasi antarbangsa yang juga akan melahirkan berbagai masalah antar budaya.¹⁶

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, hlm. 922.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 923-924.

c. Multikulturalisme dan Demokrasi

Pengakuan terhadap hak asasi manusia memicu pula pada suatu pengakuan akan hak-hak politik dari manusia di dalam kelompoknya. Hal tersebut, dikenal dengan proses demokratisasi yang berjalan seiringan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Teknologi informasi membawa manusia tidak hanya mengenal dan melaksanakan hak-hak politisnya, namun juga mengenal hak budayanya. Dalam proses demokrasi dan multikulturalisme terjadi timbal balik. Demokratisasi melahirkan pengenalan dan pengakuan terhadap kebudayaan yang beragam berarti pula pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbudaya. Multikulturalisme menjadi pendukung adanya pluralisme yaitu keberadaan budaya yang sama tinggi dan sama bernilai dalam suatu masyarakat yang plural. Konsep tersebut bisa dikatakan sebagai demokrasi yang sempurna karena bukan hanya pengakuan akan hak-hak politik dan hak-hak individu melainkan juga pengakuan hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat.

B. Konsep Pendidikan Multikultural

1. Definisi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan adalah pengembangan potensi-potensi yang terpendam.¹⁷ Multikultural adalah sebuah pemahaman tentang konsep budaya dan permasalahannya. Keberagaman budaya mencakup keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat.¹⁸ Pendidikan multikultural merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial,

¹⁷ Hasan Lagulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), hlm. 3.

¹⁸ Dani Nurcholis, *Transformasi Pendidikan Multikultural di Sekolah*, (Jawa Timur: Parasurama Education, 2019), hlm. 42.

musyawarah, hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama.¹⁹

Pendidikan multikultural memiliki banyak penafsiran antar para pakar pendidikan, berikut beberapa pandangan pendidikan multikultural oleh beberapa ahli yang dirangkum oleh Choirul Mahfud:²⁰

- a. Menurut Andersen dan Chuser, pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.
- b. Menurut James Banks, pendidikan multikultural sebagai usaha mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan kemudian menyikapinya dengan penuh toleran dan semangat egaliter.
- c. Menurut Muhaemin el Ma'hady, berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam mersepon perubahan demografi dan lingkungan rakyat tertentu atau bahkan secara global.
- d. Menurut Hilda Hernandez, pendidikan multikultural merupakan perspektif yang mengakui realitas politik, sosial dan ekonomi dalam diri masing-masing individu yang beragam dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksual dan gender, etnisitas, agama, status sosial dan ekonomi dalam proses pendidikan.
- e. Menurut Prof. HAR Tilaar, pendidikan multikultural merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas dengan paradigma mencakup subjek-subjek yang mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang. Definisi-definisi tentang pendidikan multikultural diatas, senada dengan pendapat Paulo Freire pakar pendidikan pembebasan, bahwa pendidikan bukan suatu usaha menjauhkan dari realitas sosial dan

¹⁹ HAR Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 167-168.

²⁰ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 175-179.

masyarakat, melainkan pendidikan adalah menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya.²¹ Sedangkan menurut Ainurrafiq Dawam mendefinisikan pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku dan aliran/agama.²²

Pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat yang multikultural dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan serta strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural harus mencakup aspek toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural, agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal serta aspek lainnya yang relevan.²³

Sesuai dengan lingkup, situasi dan kondisi Indonesia yang beragam dan plural maka dapat dikatakan pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan untuk mentransformasi nilai-nilai yang mampu mencerdaskan dan memuliakan manusia dengan menghargai identitas dirinya, menghargai perbedaan suku bangsa, budaya, ras, agama, dan kepercayaan, cara pandang, serta menggali dan menghargai kearifan lokal budaya Indonesia.²⁴

Pendidikan multikultural bukan hanya berbicara mengenai sejarah, mendata objek budaya, memahami latar belakang peserta didik ataupun revisi isi kurikulum. Lebih dari itu, pendidikan multikultural sebagai

²¹ Yaya Suyana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm196.

²² Ainurrafiq Dawam, *Emoh Sekolah "Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikultural"*, (Yogyakarta: Inspeal Press, 2008), hlm. 100-101.

²³ Said Aqil Husein Al Munawwar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta Selatan: Ciputat Pres), hlm. 213.

²⁴ Murniatai Agustian, *Pendidikan Multikultural*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 10.

pedagogi merupakan alternatif untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai pelaku perubahan di dalam masyarakat yang melahirkan individu dan pemimpin yang menghargai martabat manusia itu sendiri, termasuk di dalamnya cara berpikir, situasi sosial budaya, dan hasil karya sehingga menjadi manusia yang membentuk masyarakatnya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan multikultural menjadi sarana transformasi sosial.²⁵

Berdasarkan paparan di atas tentang pendidikan multikultural maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sistem pendidikan kompleks yang mengintegrasikan antara kurikulum, kebijakan dan strategi pendidikan dalam mengeksplorasi setiap perbedaan dari segi suku, budaya, ras, agama dan cara pandang pada setiap diri masing-masing individu dengan menciptakan sikap toleransi, menghargai setiap perbedaan, memahami bahaya diskriminasi, mampu meredam konflik dan mediasi, menjunjung tinggi HAM, demokrasi dan pluralitas, dan kemanusiaan serta merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksual dan gender, etnisitas, agama, status sosial dan ekonomi dalam proses pendidikan sehingga tercipta tatanan masyarakat yang terdidik, dan berbudaya serta damai hidup dalam keberagaman.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Multikultural

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajarn ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap diri individu. Pendidikan multikultural pada dasarnya menanamkan pada diri individu untuk berpikir lateral, keanekaragaman dan menghargai keunikan sehingga adanya perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada setiap pribadi yang terdidik.²⁶

²⁵ Admila Rosada, Doni Koesoema, dkk, *Pendidikan Multikultural: Strategi Mengelola Keberagaman di Sekolah*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), hlm. 13.

²⁶ Yaya Suyana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya*, hlm. 199.

James A. Banks merumuskan bahwa pendidikan multikultural memiliki empat dimensi pokok yang saling berkaitan, yaitu:²⁷

- a. *Content integration*, suatu upaya mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam disiplin ilmu.
- b. *The knowledge construction process*, suatu metode bagaimana membawa siswa memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran.
- c. *An equity pedagogy*, suatu usaha untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, culture, maupun social.
- d. *Prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, berinteraksi dengan seluruh civitas akademika yang berbeda etnis dan ras sebagai upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif dalam multikultural.

Perbedaan pada diri individu harus diakui dalam pendidikan multikultural. Melalui pendidikan multikultural, setiap individu diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan berbagai macam budaya. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa:²⁸

- a. Memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat.
- b. Menghormati dan mengapresiasi ke-bhinneka-an budaya dan sosio-historis entik.
- c. Menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan bias persangkaan.

²⁷ James A. Banks dan Cherry A. McGee Banks (Ed), *Multikultural Education: Issues and Perspective*, (Amerika: Allyn and Bacon, 1997), hlm. 17.

²⁸ Yaya Suyana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya*, hlm. 199-200.

- d. Memahami faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik, ketimpangan dan keterasingan etnik.
- e. Meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis melalui sebuah visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas.
- f. Mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.

Secara konseptual, Gorsky menjelaskan pendidikan multikultural memiliki tujuan sebagai berikut: (a) setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan prestasi; (b) siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; (c) mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar; (d) mengakomodasi semua gaya belajar siswa; (e) mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda; (f) mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda; (g) untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat; (h) belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda; (i) untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global; dan (j) mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Pendidikan multikultural sebagai proses menyiratkan bahwa bukan hanya aktivitas yang dilakukan sekarang, namun harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan. Kesetaraan pendidikan seperti kebebasan dan keadilan belum sepenuhnya tercapai. Rasisme, seksisme, dan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas sulit dihilangkan, meskipun sudah berusaha keras untuk menghilangkannya. Setiap kali kelompok diidentifikasi dan diberi label, penggolongan terjadi. Ketika

²⁹ Hamid Hasan, "Pendekatan Multikultural untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Januari-November 2000, hlm. 102.

penggolongan terjadi anggota dalam kelompok hanya mendukung anggota kelompoknya dan mendiskriminasi anggota kelompok yang baru masuk.³⁰

3. Prinsip Pendidikan Multikultural

Sebagai suatu gerakan pembaharuan yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, maka pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada; (b) pendidikan multikultural mengandung dua dimensi yaitu pembelajaran dan kelembagaan, dan diantara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif; (c) pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privileges untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan; (d) berdasarkan analisis kritis, maka tujuan pendidikan multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; (e) pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya.³¹

Pada tahap pelaksanaan, prinsip pendidikan multikultural yakni; *pertama*, pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang. *Kedua*, pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah. *Ketiga*, kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan

³⁰ Murniati Agustin, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 8.

³¹ Akhmad Hidayatullah Al Arifin, "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia", dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 75.

sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda. *Keempat*, pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.³²

Sedangkan Tilaar mengemukakan terdapat tiga prinsip dalam pendidikan multikultural, yakni; *Pertama*, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*). *Kedua*, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya.³³

4. Ciri Pendidikan Multikultural

Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi mengemukakan ciri-ciri dari pendidikan multikultural adalah; (a) tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berperadaban (berbudaya); (b) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (kultural); (c) metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keragaman budaya bangsa serta kelompok etnis (multikultural), dan; (d) evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.³⁴

Laurence A. Blum menjelaskan multikulturalisme memiliki tiga elemen sosial, yakni; (a) menegaskan identitas kultural seseorang dengan cara mempelajari dan menilai warisan budaya orang tersebut; (b) menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar kebudayaan

lain selain budayanya sendiri; (c) menilai dan merasa cocok dengan

³² Ismail Fuad, "Konsep Pendidikan Multikultural dalam Pendidikan Islam", dalam Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2009, hlm. 29.

³³ HAR Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 195.

³⁴ Ali Maksum dan Luluk Y Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 191-192.

adanya perbedaan sebagai kenyataan hidup yang dianggap positif, harus dihargai dan dipelihara.³⁵

Secara kritis pendidikan multikultural memiliki aspek; (1) mengakui budaya siswa; (2) menantang hegemonik; (3) menuntut refleksi atas pedagogi; (4) mengajarkan membangun rasa harga diri; (5) mendorong kebebasan untuk membahas dan mempelajari isu kontroversial; (6) menjanjikan transformasi masa depan, keadilan dan persamaan dari semua kelompok sosial budaya.³⁶

Dalam tradisi keilmuan, multikulturalitas terdapat dua orientasi, yaitu; *pertama*, multikulturalitas statis yang berarti suatu pandangan mengenai keagamaan yang bersifat fragmentatif, keragaman itu bersifat serpihan-serpihan budaya yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan spesifikasi masing-masing. Masing-masing anggota kelompok berupaya mempertahankan identitas partikularitas masing-masing. *Kedua*, multikulturalitas dinamis yang berarti bahwa dalam keragaman budaya atau tradisi terjadi interkulturalitas, sehingga terjadi dialog yang dinamis antara masing-masing budaya. Identitas baru yang dibentuknya tidak terkungkung oleh lokalitas tertentu, tetapi menekankan kolektivitas identitas lokalitas masing-masing kelompok identitas yang telah mengalami kondisi frgmentasi.³⁷

5. Pendekatan Pendidikan Multikultural

Tatanan masyarakat merupakan bagian penting untuk men-*design* pendidikan multikultural. Tatanan masyarakat yang masih penuh

³⁵ Shofiyulloh MZ, dkk, "Multikulturalisme, Muhammadiyah, dan Pluralitas Islam di Yogyakarta", dalam Jurnal Istiqro' Vol. 05, No. 01, 2006, hlm. 40-41.

³⁶ M. Sastrapratedja, "Posmodernisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan", dalam Jurnal Basis: Menembus Fakta, Vol. 58, No. 07-08, Juli-Agustus 2009, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 14-15.

³⁷ Tagjoer Ridjal Baidoeri, "Ragam Reaksi Akulturatif Masuknya Ide-Ide Baru dalam Dunia Pesantren" dalam makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengasuh Pondok Pesantren Se-Jawa Timur "Peningkatan Peran Pondok Pesantren dalam Membangun Budaya Damai", 12-13 Agustus 2009 diselenggarakan oleh FAI Universitas Darul Ulum Jombang kerjasama dengan Puslitbang dan Diklat Depag RI, hal 13-15. Dalam Mohammad Dahlan, *Ijtihad Paradigm of Multicultural Islamic Law ..*, hlm. 171-178.

diskriminasi dan bersifat rasis akan sulit diaplikasikan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam proses pendidikan multikultural diperlukan beberapa pendekatan, yakni;³⁸ *pertama*, tidak lagi menyamakan pandangan pendidikan dengan persekolahan, atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pendidikan merupakan transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi keliru bahwa tanggungjawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan peserta didik semata-mata berada di tangan mereka, melainkan harus melibatkan banyak pihak yang bertanggungjawab, karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah. *Kedua*, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. *Ketiga*, pendidikan multikultural tidak mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik. *Keempat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. *Kelima*, pendidikan formal maupun non formal meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan bukan untuk menjauhkan diri dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non pribumi.

Sedangkan penjelasan Banks sebagaimana yang dikutip oleh Yaya Suyana dan Rusdiana, terdapat empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum atau pembelajaran di sekolah, yaitu:

- a. Pendekatan kontribusi (*the Contributions Approach*), ciri dari pendekatan ini adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku bangsa atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai.
- b. Pendekatan aditif (*Aditif Approach*), pendekatan pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif, terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karaktersistik

³⁸ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural, ...*, hlm. 191-193.

dasarnya. Pendekatan ini merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural karena belum menyentuh kurikulum utama.

c. Pendekatan transformasi (*The Transformation Approach*), pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis.

d. Pendekatan aksi sosial (*The Social Action Approach*), pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformatif juga menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu atau masalah yang dipelajari dalam unit. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik siswa melakukan kritis sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan serta menjadi partisipan yang telatih dalam perubahan sosial.³⁹

Tilaar mengerucutkan pendekatan-pendekatan mengenai hakikat pendidikan ke pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural, menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan reduksionisme dan pendekatan holistik integratif. Pendekatan reduksional dijabarkan sebagai berikut:⁴⁰

a. Pendekatan pedagogis, pendekatan ini bertitik tolak pada pandangan bahwa anak akan dibesarkan menjadi dewasa melalui pendidikan. Mengapresiasi setiap perkembangan yang dilalui oleh anak menuju kedewasaan.

b. Pendekatan filosofis, pandangan ini bertolak dari pandangan mengenai hakikat manusia dan hakikat anak. Anak memiliki nilai-nilai sendiri yang akan berkembang menuju nilai-nilai seperti orang dewasa. Hal ini melahirkan pandangan bahwa anak adalah titik tolak pendidikan.

³⁹ Yaya Suyana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa....*, hlm. 211-212.

⁴⁰ HAR Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 18-25.

- c. Pendekatan religius, pendekatan ini memandang manusia sebagai makhluk religious. Pada dasarnya hakikat pendidikan adalah membawa peserta didik menjadi manusia yang religious.
- d. Pendekatan psikologis, pandangan ini menekankan mengenai bagaimana anak dibesarkan melalui proses belajar mengajar pada usia yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya.
- e. Pendekatan negativis, pandangan ini menyederhanakan proses pendidikan proses pendidikan dan optimis terhadap potensi peserta didik. Pada dasarnya pendidikan bukanlah penjaga tanaman yang menjaga dari tanaman tersebut agar tidak terkena hama.
- f. Pendekatan sosiologis, pandangan ini meletakkan hakikat pendidikan pada keperluan hidup bersama dalam masyarakat. Pandangan ini bertitik tolak pada prioritas kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan individu.

Sedangkan pendekatan holistik integratif memiliki komponen-komponen sebagai berikut:⁴¹

- a. Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan. Proses tersebut berimplikasi bahwa didalam peserta didik terdapat kemampuan-kemampuan yang immanen sebagai makhluk yang hidup dalam suatu masyarakat. Proses pendidikan yang berkesinambungan berarti bahwa pendidikan tidak berhenti setelah dewasa tetapi terus menerus berkembang selama erdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.
- b. Proses pendidikan berarti menumbuh kembangkan eksistensi manusia. Eksistensi atau keberadaan manusia adalah suatu keberadaan interaktif yang terus menerus berlangsung sepanjang hayat.
- c. Eksistensi manusia yang memasyarakat. Proses pendidikan adalah proses mewujudkan eksistensi manusia yang memasyarakat. Pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang bermoral.

⁴¹ HAR Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan.....*, hlm. 28-32.

- d. Proses pendidikan dalam masyarakat yang membudaya. Pendidikan merupakan pranata sosial tempat kebudayaan itu berkembang. Kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- e. Proses bermasyarakat dan membudaya mempunyai dimensi waktu dan ruang. Dimensi ruang dan waktu dalam proses pembudayaan merupakan konsituen dan eksistensi manusia yang tidak dapat dipisahkan. Proses pendidikan terikat dengan kehidupan masyarakat yang mengarah ke masa depan.

C. Konsep Budaya Mutu

1. Sejarah Budaya Mutu

Pada pertengahan abad ke-19, Williams berpendapat bahwa kata budaya mulai berkembang sebagai konsep abstrak. Dalam bahasa Perancis, budaya dikaitkan dengan peradaban. Dalam bahasa Jerman, kultur (yang berevolusi dari, Cultur di C19) adalah sinonim untuk peradaban.⁴²

Konsep budaya diselaraskan dengan gagasan keadaban dan mengalami kecenderungan sempurna. Sebagai contoh, dalam karya Arnold (1869), pandangannya tentang neo-platonis budaya memiliki kesamaan karakteristik antara keindahan dengan kecerdasan, sebagaimana budaya merupakan komponen negara demokratis yang sehat. Eliot (1948) berpendapat bahwa budaya Kristen Eropa Barat adalah bentuk budaya tertinggi. Herder (1784-1791) menyerang asumsi kemajuan linier melalui sejarah peradaban dan pandangan budaya Eropa ke-18 yang dominan. Herder juga menyerang imperialisme budaya bahwa budaya Eropa yang dominan adalah penghinaan secara terang-terangan terhadap keagungan alam. Herder berpendapat bahwa terdapat budaya yang berbeda dengan bangsa yang berbeda dari berbagai

⁴² Lee Harvey dan Bjorn Stensaker, "Quality Culture: Understandings, boundaries and linkages" dalam jurnal *European: Journal of Education* 24 November 2007, hlm. 2.

sosial dan ekonomi kelompok-kelompok dalam sebuah bangsa.⁴³ Herder mengkritik terhadap konsep budaya elitis yang homogen, karena hal tersebut sebagai penghalang dari *quality culture*. Pendekatan Herder tercermin dalam beberapa cabang antropologi, yang mengapresiasi keragaman budaya sebagai deskriptif, inklusif dan relativistik.

Di Inggris, studi budaya dikembangkan di *University of Birmingham* tepatnya di *Centre for Contemporary Cultural Studies* (CCCS). Berangkat dari pandangan Williams, CCCS memaparkan "*popular culture*" jauh lebih penting sebagai bentuk perlawanan untuk mengangkat kelompok yang terpinggirkan dan tidak berkekuatan daripada sebagai perwujudan bentuk seni nonkritik dan sederhana.⁴⁴

Pada tahun 1980-an, analisis teori budaya berlanjut dengan mengeksplorasi reaksi kritis. Pendekatan budaya dianjurkan dalam lingkup organisasi. Minat kualitas muncul selama tahun 1980-an, sebagaimana keberhasilan bisnis Jepang setelah Perang Dunia II telah dikaitkan oleh sejumlah faktor budaya dan hal ini berdampak positif pada organisasi dan perilaku organisasi (Mickletwait & Wooldridge 1996). Salah satu gagasan utama dari pergerakan kualitas adalah peningkatan berkelanjutan (*kaizen*). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kualitas sebenarnya berasal dari perspektif budaya yang lebih luas.⁴⁵

2. Budaya Mutu sebagai Paradigma Baru

Pada tahun 1990-an, budaya mutu (*total quality culture*) berpusat pada nilai. *Total quality culture* dibangun oleh pemimpin yang berpikir keras dan membawa anggotanya untuk memiliki pandangan sebuah

⁴³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁴⁵ Lee Harvey dan Bjorn Stensaker, "Quality Culture.....", hlm. 6.

paradigma baru tersebut. Sebuah tim akan belajar dan mengadopsi budaya baru sebagai milik mereka.⁴⁶

Kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan politik akan dengan mudah hancur. Sedangkan kekuatan mental akan tetap bertahan. Kekuatan mental yang akan menuntut perubahan kualitas, pertumbuhan dan kemajuan. Perubahan kebiasaan organisasi, tergantung dari perubahan kepribadian anggotanya. Perubahan kepribadian anggota organisasi dipengaruhi oleh kualitas budaya yang dikembangkan melalui sistem kerja. Perubahan yang hebat dilihat dari kejelasan visi, misi, inovasi, pembaruan, komitmen, kualitas, disiplin, energi dan kepribadian sosok pemimpin. Pemimpin berperan mengoptimalkan sisi kemanusiaan sebagai sumber daya yang kuat.⁴⁷

Joe Batten mengemukakan komponen utama *total quality culture* sebagai berikut:

- a. *Commitment to transcendent vision, missions and goals* (komitmen terhadap visi, misi dan tujuan)
- b. *Recognizing that people will follow learners* (kenali setiap individu sebagai pembelajar)
- c. *Targeting the creative and logical deployment of people's strengths as the organization principle of the future* (target pada penyebaran kekuatan individu yang kreatif)
- d. *Continually translating values into action* (mengaplikasikan nilai ke dalam tindakan)
- e. *Placing a premium on the team at all times* (kerja tim selalu berlandaskan pada kualitas)
- f. *Fostering and training self-led teams* (membina dan melatih tim)
- g. *Promoting passionate rather than passive behavior* (promosi jabatan bagi individu yang aktif)
- h. *Targeting results that pull, not push* (menargetkan hasil yang menarik)
- i. *Providing dynamic autonomy, delegation and empowerment* (memberikan otonomi, delegasi, dan pemberdayaan yang dinamis.)
- j. *Fostering the shared believe that "we can accomplish anything: the difficult we do immediately, the impossible takes a little longer."* (menumbuhkan keyakinan bersama bahwa "kita dapat

⁴⁶ Joe Batten, *Building a Total Quality Culture*, (Eugene: A Division of Wipf and Stock Publisher, 2014), hlm. 5-6.

⁴⁷ *Ibid* ..., hlm. 9.

mencapai apa pun: yang sulit kita lakukan segera, yang mustahil membutuhkan waktu sedikit lebih lama.")

k. *Personal leadership that others want to emulate and follow*

(kepribadian pemimpin yang pantas untuk ditiru dan diikuti)

l. *Rewarding learners rather than knowers* (individu yang bermanfaat lebih baik dari sekedar tahu)

m. *A pervasive culture of commitment to continuous learning and to new dimensions of service* (budaya komitmen meresap untuk pembelajaran berkelanjutan dan dimensi layanan baru)

n. *Understanding and practicing leadership at every level and every part of the organization* (memahami dan mempraktikkan kepemimpinan di setiap tingkatan dan setiap bagian dari organisasi.)

o. *Creating job evaluation criteria based on innovation, quality, creativity, and change* (menciptakan kriteria evaluasi pekerjaan berdasarkan inovasi, kualitas, kreativitas, dan perubahan.)

p. *Creating policies and programs that build and enhance a high level of physical, mental, and spiritual energy* (menciptakan kebijakan dan program yang membangun dan meningkatkan tingkat energi fisik, mental, dan spiritual yang tinggi.)

q. *Stretching and clarifying all dimensions of the culture* (menjelaskan semua dimensi budaya)

r. *Giving earned praise freely. Don't stint!* (memberikan apresiasi)⁴⁸

Komponen utama *total quality culture* terangkum sebagai berikut, bahwa komitmen terhadap visi, misi dan tujuan merupakan komponen penting dalam menentukan *total quality culture*. Kepemimpinan sebagai top manajer harus dipraktikkan pada setiap tingkatan dan bagian dari organisasi dengan memperhatikan kriteria evaluasi berdasarkan pada inovasi, kualitas, kreativitas serta progresifitas. Kebijakan dan program dibuat untuk meningkatkan kekuatan fisik, mental dan spiritual anggotanya. Semua itu terangkum dalam dimensi budaya. Organisasi yang menerapkan beberapa komponen utama tersebut dapat mengubah sikap anggotanya dalam berorganisasi.

Organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, dicapai secara efektif melalui tindakan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai pembagian

⁴⁸ *Ibid* ..., hlm. 6.

tugasnya dengan penuh tanggungjawab.⁴⁹ Sebagaimana pendapat Edward Sallis bahwa suatu organisasi atau lembaga yang sukses adalah mereka yang responsif terhadap masa depan.⁵⁰ Sebuah organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperlukan sebuah nilai atau keyakinan yang tertanam pada setiap diri individu anggotanya. Nilai atau keyakinan tersebut terangkum dalam budaya organisasi.

Budaya organisasi merupakan perwujudan dari visi-misi, nilai maupun citra organisasi yang dimanifestasikan oleh anggotanya. Budaya organisasi sebagai salah satu faktor yang menentukan perilaku manajemen suatu lembaga organisasi. Kekuatan budaya organisasi akan mendukung ketercapaian tujuan-tujuan suatu lembaga, namun sebaliknya jika budaya organisasi lemah maka akan menghambat ketercapaian tujuan suatu lembaga. Budaya yang kuat menjadi kunci dari terbentuknya inovasi-inovasi progresif sebagai bentuk prestasi positif anggotanya. Budaya yang kuat tidak pernah lepas dari sebuah manajemen. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sallis, bahwa:

Total Quality Management requires a change of culture. This is notoriously difficult to bring about and takes time to implement. It requires a change of attitude and working methods. Staff need to understand and live the message if TQM is to make an impact. However, culture change is not only about changing behaviours. It also requires a change in institutional management (budaya yang kuat atau budaya yang bermutu membutuhkan waktu, perubahan sikap dan metode kerja sehingga para anggotanya memahami makna bahwa mutu yang dikelola melalui manajemen adalah dampak dari keberhasilan sebuah organisasi).⁵¹

Budaya mutu merupakan bagian dari manajemen mutu total atau *total quality management* sebagai sebuah seni mengelola sumber daya manusia dalam organization culture.. Unsur *man* pada *total quality management* menjadi komponen penting dalam menentukan apakah

⁴⁹ Hari Sulaksono, *Budaya Organisasi dan Kinerja*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 02.

⁵⁰ Edward Sallis, *Total Quality Management...* hlm. 60.

⁵¹ Edward Sallis, *Total Quality Management ...*, hlm. 26.

manajemen dapat berjalan optimal atau tidak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus kajian dalam budaya mutu adalah penanaman nilai-nilai sosial organisasi pada diri anggota. Sumber daya manusia dikelola supaya memiliki jiwa komitmen terhadap tujuan organisasi dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu organisasi. Senada dengan pemahaman Block dalam Harvey dan Bowin yang dikutip oleh Djokosantoso Moeljono bahwa:

There is increasing evidence that firms with effective corporate cultures claim to have increased productivity, increased employees sense of ownership and increased profit (Hanya organisasi-organisasi dengan budaya organisasi yang efektif yang dapat menciptakan peningkatan produktivitas, meningkatkan rasa ikut memiliki dari para anggotanya dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan lembaga organisasi).⁵²

Pendidikan sebagai sebuah organisasi diperlukan mengelola budaya yang sesuai dengan budaya masing-masing lembaga pendidikan. Pendidikan adalah sebuah lembaga jasa yang mengelola manusia menjadi manusia yang berkualitas. Dewasa ini kompetisi pendidikan semakin ketat, sebuah lembaga pendidikan perlu meningkatkan kualitas pendidikan yang berorientasi pada mutu sebagai bentuk ikhtiar berdaya saing kuat. Pendidikan bertanggungjawab lebih atas mutu produk berupa kualitas siswa. Lembaga sekolah dalam mengelola organisasinya perlu memegang prinsip-prinsip manajemen yang mengacu pada visi-misi sekolah. Proses manajemen dijalankan dalam program-program sekolah yang ditampilkan oleh pimpinan sekolah sebagai penanggung jawab layanan belajar peserta didik dan guru sebagai penanggungjawab layanan teknis kependidikan di sekolah.⁵³ Berdasarkan pelayanan tersebut, pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila jasanya mendapat kepuasan tersendiri pada penggunaannya.

⁵² Djokosantoso Moeljono, *Cultured! Budaya Organisasi dalam Tantangan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 3.

⁵³ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan ...*, hlm. 55.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin atau *top management* harus mengenal secara baik faktor-faktor psikologis sumber daya manusia sehingga pengelolaan budaya mutu dapat berjalan sesuai nilai-nilai dalam organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia pendidikan, budaya organisasi dikenal dengan istilah *academic culture*. *Academic culture* akan mengatur pendidik agar memahami, sebagai berikut: (1) bagaimana seharusnya bersikap terhadap profesinya, (2) beradaptasi terhadap rekan kerja dan lingkungan kerjanya, (3) reaktif terhadap kebijakan pimpinan.⁵⁴

Pendapat Webber, sebagaimana yang dikutip oleh Warni Tune Sumar mengungkapkan bahwa budaya terdapat empat sistem yang menghubungkan antara budaya dengan manajemen sekolah, yaitu:⁵⁵ sistem budaya, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan sistem politik. Sedangkan dalam pemahaman Mulyadi, kriteria manajemen sekolah berbudaya mutu nampak pada lima pilar mutu pendidikan, yaitu:

a. Fokus pada siswa

Sekolah dan profesional pendidikan memiliki tanggungjawab besar untuk selalu mengoptimalkan potensi-potensi siswa agar mendapat manfaat dari proses belajar di sekolah. Dengan kata lain, dalam proses kegiatan belajar mengajar perlu dipersiapkan dengan baik, dikelola secara profesional agar dapat memberikan nilai manfaat yang besar bagi pengembangan potensi siswa.

b. Keterlibatan total

Mutu bukan hanya tanggungjawab kepala sekolah, namun menjadi tanggungjawab semua pihak *stakeholder* pendidikan bahwa setiap orang harus berpartisipasi dalam transformasi mutu.

c. Pengukuran

Ukuran mutu pada suatu lembaga pendidikan terletak pada kualitas outputnya yaitu prestasi siswa.

⁵⁴ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*, hlm. 149.

⁵⁵ Warni Tune Sumar, *Strategi Pemimpin dalam Penguatan Iklim Sekolah Berbasis Budaya Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 153.

d. Komitmen

Para *stakeholder* pendidikan harus memiliki komitmen pada mutu. Jika mereka tidak memiliki komitmen, maka proses transformasi mutu tidak akan dimulai dan apabila terpaksa dijalankan maka dipastikan akan gagal. Sehingga perlu adanya perubahan budaya dan manajemen yang memiliki komitmen untuk mendukung proses perubahan pada peningkatan mutu.

e. Perbaikan berkelanjutan

Mutu didasarkan pada sebuah konsep, sehingga para *stakeholder* pendidikan harus konstan menemukan cara untuk menangani masalah yang muncul, mereka harus memperbaiki proses yang dikembangkannya dan membuat perbaikan yang diperlukan.⁵⁶

Pemeliharaan budaya mutu sekolah secara umum terdapat dua cara yang dapat digunakan yaitu; *pertama*, cara formal adalah dengan masuknya peserta baru maka diwajibkan untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan untuk mengenalkan budaya yang ada dan berlaku selama di sekolah. *Kedua*, cara informal adalah memperkenalkan budaya yang ada dengan cara sosialisasi langsung, percontohan perilaku dan tatakrama.⁵⁷ Budaya memiliki pengaruh besar bagi keberlangsungan hidup organisasi. Melalui budaya mutu, nilai-nilai sosial akan tertanam pada diri anggotanya dan menciptakan komitmen serta berdampak positif pada ketercapaian tujuan organisasi.

3. Definisi Budaya Mutu

Banyak ahli yang menjelaskan budaya mutu sebagai berikut:

- a. Menurut M.Sashkin dan K.Kise (dalam Hardjosoedarmo, 2004:91-92), budaya mutu adalah sebuah keyakinan yang menunjukkan sikap tentang cara untuk melakukan sesuatu dengan

⁵⁶ Mulyadi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 32.

⁵⁷ Akhmad Said, *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam* ,hlm. 269.

mantap dalam organisasi dengan nilai yang membentuk penghayatan anggotanya.

b. Menurut Goetch dan Davis (dalam Tjiptono, 2003:75), budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan kualitas secara terus menerus.

c. Menurut Tjiptono, budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur dan harapan yang meningkatkan kualitas.

d. Menurut Sudjatmoko, budaya mutu adalah keseluruhan total pikiran dan karya manusia yang berbentuk sistem nilai dari suatu organisasi yang mampu mempengaruhi lingkungan menjadi kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu yang berlangsung melalui proses tertentu secara kontinu.⁵⁸

Dapat disimpulkan, budaya mutu adalah sebuah nilai tradisi yang tertanam dalam diri anggota organisasi sehingga lingkungan menjadi kondusif untuk meningkatkan kualitas organisasi.

D. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian hasil penelitian yang relevan atau kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang mengarah pada pandangan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya tentang permasalahan yang serupa.⁵⁹ Peneliti melakukan kajian pustaka untuk menemukan beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil pencarian literature yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian ini dikaji ulang untuk terhindar dari adanya pengulangan penelitian dan membatasi wilayah

kajian. Telaah pustaka ini dilakukan guna mengetahui letak persamaan dan

⁵⁸ Sudjatmoko, *Leader Transformasional*, (Sukoharjo: Panembahan Senopati, 2015), hlm. 30-31.

⁵⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), hlm. 138.

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Diantara hasil penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

Penelitian Fatah 'Arifudin,⁶⁰ fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas tentang manajemen sekolah dalam menanamkan nilai-nilai multikultural yang menitikberatkan objek penelitian di SMP VIP Al Huda Jetis Kutosari Kebumen. Manajemen sekolah tersebut meliputi, manajemen perencanaan yaitu melalui menentukan visi, misi dan tujuan sekolah melalui rapat kerja baik rapat tim maupun rapat pleno dengan merencanakan program internalisasi nilai-nilai multikultural yang diintegrasikan dengan pembelajaran dan kebudayaan di sekolah. Manajemen pengorganisasian yang dilakukan oleh staf dan tim sekolah, kemudian manajemen pengarahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, dan terakhir manajemen pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal. Sekolah berhasil menanamkan nilai-nilai multikultural pada siswa, hal ini dapat dilihat dari para siswa menghargai setiap perbedaan yang ada, menghindari perselisihan dengan menjunjung tinggi asas kebersamaan, keadilan, dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Penelitian Eko Setiawan,⁶¹ fokus kajian dalam jurnal ini adalah memaparkan konsep pemikiran Gus Dur yang berkaitan dengan pendidikan

Islam multikultural berwawasan keindonesiaan. Pandangan Gus Dur tentang

⁶⁰ Fatah 'Arifudin, "Manajemen Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Multikultural pada Siswa di SMP VIP Al Huda Jetis Kutosari Kebumen", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

⁶¹ Eko Setiawan, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Prinsip Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Keindonesiaan", dalam Jurnal Pendidikan Islam: Edukasia Islamika, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm. 32-45.

kebhinekaan budaya memiliki konotasi positif pada aspek pendidikan. Prinsip pendidikan multikultural menurut pemikiran Gus Dur meliputi:

1. Pendidikan Islam multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada.
2. Pendidikan Islam multikultural mengandung dua dimensi, yaitu pembelajaran kelas dan kelembagaan sekolah dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif.
3. Pendidikan Islam multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya analisis kritis atas sistem kekuasaan dan privileges untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan.
4. Tujuan pendidikan Islam multikultural adalah menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Pendidikan Islam multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya.

Penelitian Yuli Adhani,⁶² fokus kajian dalam jurnal ini adalah memaparkan bagaimana konsep pendidikan multikultural sebagai sarana pencegahan konflik. Masyarakat multikultural yang demokratis di Indonesia yang sehat tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, namun harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated, dan berkesinambungan. Hal ini dikarenakan realitas multikultural yang ada di Indonesia merupakan kekayaan dan kekuatan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Untuk itu, pendidikan multikultural di Indonesia harus mengembangkan model pembelajaran yang mengarah pada beberapa kompetensi dasar yang harus diwakili warga negara, yang meliputi:

⁶² Yuli Adhani, "Konsep Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik", dalam Jurnal *Social Science Education: Sosio Didaktika*, Vol. 1, No. 1, Mei 2014, hlm. 111-121.

1. Mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar tentang nilai persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat atau saling menghargai dalam beraneka jenis keberagaman.
2. Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang budaya dan agama sendiri dan juga budaya dan agama lain dalam masyarakat.
3. Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas tentang isu-isu dan masalah keseharian melalui sebuah proses demokratis atau penyelidikan dialogis.
4. Membantu mengkonseptualisasi dan mengaspirasikan konstruksi masyarakat yang lebih baik, demokratis, egaliter, tanpa ada diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran terhadap nilai asasi universal.

Penelitian A'idatul Faizah,⁶³ fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan multikultural diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, nilai-nilai pendidikan multikultural diterapkan dalam hal-hal yang sederhana, seperti bersalaman dengan guru, bekerjasama dalam kelompok tanpa memilih teman, memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat teman, menghormati teman yang sedang merayakan hari besar keagamaan, tidak mengejek serta mengganggu teman, dan lain sebagainya.

Pembelajaran PAI yang menanamkan nilai-nilai multikultural didukung oleh kebijakan dari kepala sekolah serta SDM guru PAI yang berpengalaman dan memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang baik, adanya dukungan finansial dan beragamnya media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurikulum yang dipakai masih KTSP dan kurangnya perhatian *stakeholder* yang mendukung.

⁶³ A'idatul Faizah, "Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus di SD Setia Budhi Gresik", dalam Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Penelitian Akhmad Said,⁶⁴ fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengkorelasikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap budaya mutu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, dalam mengelola sekolah maupun madrasah diperlukan model dan gaya kepemimpinan sekolah. Adapun nilai-nilai yang mendasari model dan gaya kepemimpinan salah satunya adalah budaya mutu. Budaya mutu sekolah merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan yang diyakini oleh warga sekolah serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah internal ataupun eksternal dan merupakan dasar dan landasan bagi perubahan dalam hidup pribadi atau kelompok.

Untuk menjaga keorisinalitas penelitian, maka peneliti mengkaji persamaan dan perbedaan dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal yang sama dengan penelitian terdahulu, maka peneliti

merumuskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul, Jenis dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<i>Manajemen Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Multikultural pada Siswa di SMP VIP Al Huda Jetis Kutosari Kebumen</i> , oleh Fatah 'Arifudin pada Tesis tahun 2015.	Mengkaji tentang multikultural	Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi nilai-nilai multikultural di sekolah.	Terdapat relevansi tentang pendidikan multikultural

⁶⁴ Akhmad Said, "Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melestarikan Budaya Mutu Sekolah", dalam *Jurnal Evaluasi*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, hlm. 257-273.

2.	<i>Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Prinsip Pendidikan Islam Multikultural Berwawasan Keindonesiaan</i> , oleh Eko Setiawan pada penelitian mandiri tahun 2017.	Mengkaji tentang Pemikiran Gus Dur	Mengkaji pada pemikiran Gus Dur tentang prinsip pendidikan Islam multikultural yang berwawasan keindonesiaan.	Terdapat relevansi tentang pemikiran Gus Dur dan pendidikan multikultural
3.	<i>Konsep Pendidikan Multikultural sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik</i> , oleh Yuli Adhani pada penelitian mandiri tahun 2014.	Mengkaji tentang pendidikan multikultural	Mengembangkan model pembelajaran dengan konsep pendidikan multikultural upaya alternatif mencegah konflik,	Terdapat relevansi tentang konsep pendidikan multikultural
4.	<i>Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus di SD Setia Budhi Gresik</i> , oleh A' idatul Faizah pada Tesis tahun 2017	Mengkaji Pendidikan Multikultural	Fokus kajian pada penelitian ini adalah menitikberatkan nilai-nilai pendidikan multikultural diimplementasikan pada pembelajaran PAI dengan segala dukungan dan hambatannya.	Terdapat relevansi tentang pendidikan multikultural
5.	<i>Pemikiran Multikulturalisme Gus Dur dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia</i> , oleh Miskan pada Tesis tahun 2017	Mengkaji Pemikiran Multikulturalisme Gus Dur	Penelitian ini menitikberatkan pada pemikiran Gus Dur tentang multikulturalisme yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang ada dalam pendidikan	Terdapat relevansi tentang pemikiran Gus Dur

			agama Islam.	
6.	<i>Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Melestarikan Budaya Mutu Sekolah</i> oleh Akhmad Said pada penelitian mandiri tahun 2018.	Mengkaji tentang kepemimpinan sekolah dan budaya mutu	Penelitian ini memfokuskan pada korelasi kepemimpinan dengan budaya mutu suatu lembaga pendidikan	Terdapat relevansi tentang budaya mutu.

Berdasarkan telaah pustaka yang dijelaskan diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsepsi pemikiran multikultural KH. Abdurraahman Wahid terkait dengan pendidikan serta pemikiran multikultural KH. Abdurraahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menekankan metode analisis kritis untuk mengkaji gagasan dari sumber data primer yang diperkaya oleh gagasan dari sumber data sekunder yang berkaitan dengan tema pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis.¹ Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian histori (*historical research*) karena peneliti akan meneliti biografi sang tokoh dari segi kehidupan dan pemikirannya baik yang berhubungan dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikirannya.² Penelitian ini juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Analisis isi dilakukan dengan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah hingga ditemukan data yang relevan.³ Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan literer, untuk menemukan jawaban mengenai pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid perspektif budaya mutu Edward Sallis. Memecahkan suatu masalah dengan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.⁴ Data yang diambil berasal dari karya-karya KH. Abdurrahman Wahid dan ahli budaya mutu baik melalui: buku-buku, jurnal, artikel, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.⁵

¹ Jujun S. Sumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa bekerjasama dengan Pusjarlit Press, 1998), hlm. 41-61.

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1988), hlm. 62.

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 442.

⁴ Soejono, dkk, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 2.

⁵ Sunarto, *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Pendidikan*, (Surabaya: UNESA University Press, 2001), hlm. 28.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari sebuah data yang diperoleh.⁶ Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data yang dibutuhkan adalah dokumen yang berupa data-data dari perpustakaan melalui penelusuran buku-buku literatur, baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid dan budaya mutu Edward Sallis.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah buku-buku karya KH. Abdurrahman Wahid dan budaya mutu Edward Sallis, diantaranya:

- a. Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (The Wahid Institute, 2007).
- b. Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 2002).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa kumpulan jurnal yang membahas tentang pemikiran Gus Dur tentang multikultural dan budaya mutu Edward Sallis.

3. Sumber Data Penunjang

Sumber data penunjang dalam penelitian ini adalah sumber yang relevan berupa majalah, makalah, surat kabar, dokumen, dan catatan lainnya yang membahas mengenai pemikiran Gus Dur dan budaya mutu Edward Sallis.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 62.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁸

Penelitian ini fokus data yang diteliti adalah pemikiran multikultural KH. Abdurrahman Wahid dan budaya mutu Edward Sallis dalam konteks pendidikan. Data-data dari sumber primer, sumber sekunder maupun sumber penunjang dikumpulkan kemudian memperdalam kajian analisis dengan menggunakan teknik dokumenter.

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis isi. Metode analisis deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian pelaporan penelitian.⁹ Metode analisis isi adalah menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁰

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1989), hlm. 103.

⁹ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 220.

